

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Dalam RPJMN 2014-2019 disebutkan tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan atas: (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Salah satu uraian dari tantangan utama pembangunan yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.

Provinsi Sumatera Utara melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Gubernur

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023, dijabarkan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara mengemban misi ke 4 dari Visi dan Misi pembangunan daerah Sumatera Utara selama 5 tahun yaitu Bermartabat Dalam Pergaulan, sehingga melalui Misi ini sasaran yang ingin dicapai diantaranya meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan ditandai dari indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara pada tahun 2018 yaitu 90,66 berada di bawah angka nasional pada tahun yang sama dengan angka 90,99. Begitu juga halnya dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 mencapai 71,29 berada di bawah capaian nasional pada tahun yang sama yaitu 72,10. Selain daripada itu pentingnya peran dan keterlibatan anak - anak dalam pembangunan di daerah menjadi salah satu prioritas di Provinsi Sumatera Utara, karena sebagaimana diketahui bahwa Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 masih menunjukkan angka yang belum mengembirakan, karena dari 34 Provinsi Sumatera Utara termasuk provinsi dengan capaian IKKA rendah (65,60). Oleh karena itu pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara masih terus menjadi prioritas dalam pembangunan di daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara yang memerlukan kerjasama, koordinasi lintas sektor dan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global.

Dalam rangka melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai target pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman selama 1 tahun. Pembangunan PPPA di Sumatera Utara akan dilaksanakan dengan melihat seluruh target pembangunan dengan tetap mempertimbangkan adanya penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah dan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta prioritas pencapaian visi dan misi pembangunan di Sumatera Utara.

Pada triwulan 2 Tahun 2021, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang mengalami gejolak terhadap adanya penyebaran virus Corona 19, sehingga menyebabkan terjadinya berbagai macam perubahan dari seluruh aspek kehidupan. Perubahan ini dipicu oleh wujudnya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga berimplikasi pada wajibnya dilakukan perubahan yang difokuskan pada pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19 yang terjadi di Sumatera Utara. Hal ini juga yang menjadi dasar dilakukannya perubahan Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara untuk menyesuaikan target pembangunan PPPA yang terdampak pada pandemi covid 19 sebagaimana tercantum di dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pada pasal 343 yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Tentang. Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah

1. Menjadi acuan / dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara;
2. Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 yang dibiayai dengan APBD Propinsi maupun APBN;
3. Memuat pengukuran kinerja DPPPA sebagai pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi.

2.3.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan

sasaran program dan kegiatan DPPP Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam Renstra DPPP periode 2019 - 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja DPPP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD / Renstra OPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 17.640.371.619,- dengan proporsi Belanja Langsung sebesar Rp. 8.813.209.619 dan Belanja Tindak Langsung sebesar Rp. 8.827.162.000,-. Realisasi anggaran pada Dinas PPPA Sumatera Utara sebesar Rp. 12.823.847.161,- dengan proporsi realisasi anggaran pada Belanja Tindak Langsung mencapai Rp. 7.673.589.072,- dan Belanja Langsung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.150.258.089,-. Sehingga prosentase realisasi anggaran pada Dinas PPPA Tahun 2019 mencapai 72,70 %. Dalam melaksanakan perencanaan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara menjabarkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang terdiri dari 9 (sembilan) program dan 62 (enam puluh dua) kegiatan yang terbagi kepada 4 Bidang Teknis, 1 UPT dan Sekretariat sebagai pendukung dengan rincian realisasi perprogram sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.503.593.272,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 179.000.470,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.869.500,-
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.400.000,-
5. Program Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 606.139.016,-

6. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak, terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.055.919.063,-
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Konsultasi Keluarga, terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp. 267.516.100,-
8. Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 785.691.974,-
9. Program Peningkatan Sistem Data Gender Dan Anak, terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 672.128.694

Tabel. 1
Realisasi Belanja Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Jumlah Biaya Menurut APBD (Rp)	Jumlah Realisasi	%
	JUMLAH BELANJA	17.640.371.619,72	12.823.847.161	72,70%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.827.162.000	7.673.589.072	86,93%
1	Belanja Pegawai	2.827.162.000	2.539.532.777	89,83%
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.000.000.000	5.134.056.295	85,57%
B	BELANJA LANGSUNG	8.813.209.619,72	5.150.258.089	58,44%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.031.709.488,84	1.503.593.272	0,00%
1	Penyediaan Jasa administrasi keuangan/pendukung perkantoran	767.532.643,84	505.601.748	65,87%
2	Penyediaan Jasa Kebersihan	174.216.120	132.296.600	75,94%
3	Penyediaan Jasa Pengamanan	99.795.360	71.844.400	71,99%
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	65.499.800	47.280.000	72,18%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.317.350	13.418.000	93,72%
6	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air Dan Listrik	467.000.000	431.622.074	92,42%
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.220.000	323.000	10,03%
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	155.481.900	42.247.600	27,17%
9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	192.298.635	187.634.050	97,57%

10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	44.100.000	36.503.600	82,77%
11	Penyediaan Jasa Supir	48.247.680	34.822.200	72,17%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	497.927.125	179.000.470	35,95%
12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	51.428.525	51.340.000	99,83%
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.300.000	367.400	0,00%
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	421.198.600	127.293.070	30,22%
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	77.025.000	69.869.500	90,71%
15	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	39.000.000	34.675.000	88,91%
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	38.025.000	35.194.500	92,56%
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	43.097.395	10.400.000	24,13%
17	Peningkatan Mental dan spiritual SDM	29.797.395	5.200.000	17,45%
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1.300.000	1.300.000	100,00%
19	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000	3.900.000	32,50%
V	Program Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran	722.318.000	606.139.016	83,92%
20	Penyusunan Dokumen Dukung Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	66.230.000	35.851.250	54,13%
21	Pelaporan dan Peningkatan Pendukung Tugas Teknis Lainnya Dinas PP dan PA ke Dalam Daerah	216.190.000	205.251.156	94,94%
22	Koordinasi/Konsultasi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP dan PA ke Luar Daerah	434.398.000	359.686.610	82,80%
23	Fasilitasi FK - PUSPA SUMUT	5.500.000	5.350.000	97,27%
VI	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak	2.132.796.310,88	1.055.919.063	49,51%
24	Fasilitasi UPT P2TP2A Sumatera Utara	1.059.192.110,88	347.739.813	32,83%
25	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus Anak	134.705.000	28.660.000	21,28%

26	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus Anak Ke Dalam Daerah	91.390.000	89.055.808	97,45%
27	Koordinasi/Konsultasi Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus Anak Ke Luar Daerah	119.520.000	106.951.942	89,48%
28	Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan TPPO	28.094.900	1.185.000	4,22%
29	Pengelolaan Data Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kekerasan Perempuan dan Anak	150.547.100	109.578.000	72,79%
30	Penguatan Polah Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Kerjasama Dinas PP dan PA Provsu dengan Organisasi Lainnya	148.922.200	97.326.500	65,35%
31	Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (Bina Keluarga TKI)	84.751.650	61.597.000	72,68%
32	Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	139.058.050	125.300.000	90,11%
33	Penguatan dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Kondisi Tertentu	132.195.300	81.025.000	61,29%
34	Penyusunan Standard Operasional Prosedur Layanan Pengaduan	44.420.000	7.500.000	16,88%
VII	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Konsultasi Keluarga	831.956.000	267.516.100	32,16%
35	Pembentukan Dan Penguatan Forum Komunikasi Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum	-	-	0,00%
36	Penguatan SDM Pelaksana PPRG	34.806.000	29.772.000	85,54%
37	Fasilitas Pelaksanaan PUG Bidang Pembangunan Keluarga	213.746.650	26.300.000	12,30%
38	Penguatan Industri Rumahan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	60.651.900	42.850.000	70,65%
39	Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	125.092.700	24.266.250	19,40%
40	Pemantauan ,Evaluasi Dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga Ke Dalam Daerah	91.340.000	6.550.000	7,17%
41	Koordinasi/Konsultasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga Ke Luar Daerah	131.724.000	107.777.850	81,82%
42	Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	74.074.750	-	0,00%
43	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga	100.520.000	30.000.000	29,84%
VIII	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	1.592.005.450	785.691.974	49,35%
44	Fasilitasi Pengembangan Forum Anak Daerah	412.670.150	206.691.500	50,09%
45	Fasilitasi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	377.692.400	8.750.000	2,32%

46	Penguatan/Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak	115.063.300	95.025.000	82,58%
47	Penguatan Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak	24.756.050	21.222.500	85,73%
48	Penguatan Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak	52.768.000	34.588.000	65,55%
49	Penguatan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya	337.673.550	192.945.000	57,14%
50	Pemantauan ,Evaluasi Dan Pelaporan Peningkatan Pemenuhan Hak Anak Ke Dalam Daerah	65.590.000	61.852.876	94,30%
51	Koordinasi/Konsultasi Peningkatan Pemenuhan Hak Anak Ke Luar Daerah	134.560.000	128.066.598	95,17%
52	Penyusunan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	71.232.000	36.550.500	51,31%
IX	Program Peningkatan Sistem Data Gender Dan Anak	884.374.850	672.128.694	76,00%
53	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data gender dan anak	33.610.000	13.970.000	41,57%
54	Pelatihan Pemanfaatan Sistem Informasi Gender dan Anak	50.113.750	20.110.000	40,13%
55	Pelatihan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA)	98.329.500	87.103.200	88,58%
56	Pembuatan/Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi terkait Penyediaan dan Publikasi Data, Informasi Gender dan Anak	52.007.800	14.000.000	26,92%
57	Penguatan Forum Data Terpilah Data Gender Dan Anak	56.715.900	25.649.000	45,22%
58	Pemantauan ,Evaluasi Dan Pelaporan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Ke Dalam Daerah	84.590.000	82.617.354	97,67%
59	Penyusunan Profil Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	85.375.700	66.380.000	77,75%
60	KIE Pembangunan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	294.390.000	241.772.000	82,13%
61	Koordinasi/Konsultasi Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Ke Luar Daerah	69.922.000	69.125.540	98,86%
62	Fasilitasi Lembaga Penyedia Informasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	59.320.200	51.401.600	86,65%

Keseluruhan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2019 dengan capaian serapan pada belanja langsung sebesar 58,4 % dengan capaian terendah pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Hasil terjadi karena efisiensi

penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan hingga akhir tahun anggaran.

Sedangkan indikator kinerja sasaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatera Utara, disajikan pada tabel 2 berikut ini :

Tabel. 2
Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)	%	33	34	103%
2	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	/ 100.000	15	5	300%
3	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	/ 100.000	20	11	182%
4	Persentase layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	layanan	960	970	101%
5	Persentase Kabupaten/kota Layak Anak (Menuju)	%	30	42	140%

Capaian kinerja indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG diberikan target sebesar 33 perangkat daerah yang sudah melaksanakan PPRG dengan variabel pendukung berupa adanya dokumen pendukung seperti **Renstra, Renja, RKA dan DPA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah responsive Gender** Capaian indikator ini pada tahun 2019 adalah sebesar 103 persen atau sebanyak 34 OPD telah memiliki dokumen pendukung yang responsiv gender.

Adapun ke 34 OPD yang telah memiliki dokumen responsive gender tersebut adalah :

1. Dinas Perkebunan Provsu
2. Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu
4. Dinas Pendidikan Provsu
5. Dinas Kesehatan Provsu
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu

7. Dinas Koperasi dan UMKM Provsu
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu
9. Dinas Kehutanan Provsu
10. Dinas Lingkungan Hidup Provsu
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu
12. Dinas Tenaga Kerja Provsu
13. Dinas Sosial Provsu
14. Dinas Sumberdaya Air CK dan TR Provsu
15. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provsu
16. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provsu
17. Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu
18. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provsu
20. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provsu
21. Dinas Perhubungan Provsu
22. Inspektorat Provsu
23. Satuan Polisi Pamong Praja Provsu
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu
25. Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. Muhammad Ildrem Provsu
26. Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu
28. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu
29. BPSDM Provsu
30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu
31. BKD Provsu
32. RS. Haji Medan Provsu
33. Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu
34. Biro Hukum Setdaprovsu

Capaian sebanyak 34 OPD (103 %) yang telah responsive gender, maka mengindikasikan bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara sudah cukup baik.

Capaian kinerja indikator Persentase layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mana pada tahun 2019 layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan memiliki target sebesar 60 persen atau sebanyak 960 layanan dari total layanan selama 5

tahun perencanaan sebesar 100 persen atau sebanyak 5.600 layanan. Berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) P2TP2A sebagai unit pengampu dan pemberi layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan memperlihatkan bahwa capaian indikator persentase layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2019 yang ditargetnya sebesar 60 persen atau sebanyak 960 layanan telah melampaui target dengan capaian sebesar 63 persen atau sebanyak 970 layanan telah diberikan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan termasuk TPPO. Bila dilihat dari target capaian selama 5 tahun rencana pemberian layanan sebanyak 5.600 layanan (100%), maka persentase layanan yang telah diberikan pada tahun 2019 sebesar 17 persen.

Indikator lain yang menjadi pendukung capaian sasaran strategis Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang adalah Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak. Pada tahun 2019 indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan ditargetkan dari setiap 100.000 perempuan sebanyak 15 perempuan sebagai korban kekerasan, yang mana berdasarkan data kekerasan pada aplikasi Simfoni PPPA (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>) pada tahun 2019 dari 100.000 perempuan hanya terdapat 5 perempuan di Sumatera Utara yang mengalami kekerasan. Sedangkan untuk korban kekerasan pada anak di Sumatera Utara, pada tahun 2019 ditargetkan dari setiap 100.000 penduduk usia anak yang ada di Sumatera Utara sebanyak 20 orang mengalami kekerasan juga mengalami penurunan, yang mana kekerasan pada anak hingga akhir tahun 2019 dari 100.000 penduduk usia anak di Sumatera Utara hanya sebanyak 11 orang anak yang mengalami kekerasan (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>).

Adanya trend penurunan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Sumatera Utara memberikan gambaran keberhasilan upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menekan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara.

Capaian kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya keterlibatan Perangkat Daerah dalam perwujudan kota layak anak dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Pesentase Kabupaten/kota Layak Anak (Menuju) yang mana pada tahun 2019 keberhasilan indikator ini

ditargetkan sebanyak 11 Kabupaten/Kota atau sebesar 30 persen dari total sebanyak 33 Kabupaten/Kota (100 persen) di Sumatera Utara dapat meraih apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (menuju) telah berhasil mewujudkan sebanyak 14 Kabupaten/Kota atau sebesar 42 persen yang layak anak, yaitu :

1. Kabupaten Deli Serdang
2. Kabupaten Langkat
3. Kabupaten Serdang Bedagai
4. Kabupaten Labuhan Batu Utara
5. Kabupaten Labuhan Batu
6. Kabupaten Mandailing Natal
7. Kabupaten Tapanuli Selatan
8. Kabupaten Dairi
9. Kabupaten Karo
10. Kota Medan
11. Kota Tebing
12. Kota Tanjung Balai
13. Kota Padang Sidempuan
14. Kota Sibolga

Dengan capaian sebanyak 14 kabupaten/kota (42 persen) Layak Anak (menuju) menjadikan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan apresiasi **Provinsi Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak** pada tahun 2019. Pencapaian hasil dari yang ditargetkan ini, memberikan gambaran keberhasilan dan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Utara sebagai Provinsi Layak Anak.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja dan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2019 tertuang dalam Tabel 4 berikut :

Tabel 3.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2019
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra hingga Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2019	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OKPD s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019.	
KINERJA SELURUH PROGRAM					75,0%	75,0%	76,5%	37,7%	17,1%	16,0%	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	96%	100%	39%	48%	37%	39%	40,2%	13,8%	
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Pendukung Perkantoran	Jasa administrasi keuangan yang disediakan	100%	100%	73%	73%	73%	73%	73%	14,3%	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa kebersihan yang disediakan	100%	100%	76%	76%	76%	76%	76%	10,4%	
3	Penyediaan Jasa Pengamanan	Jasa pengamanan yang disediakan	100%	100%	49%	49%	49%	49%	49%	14,8%	
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman yang disediakan	100%	100%	33%	33%	33%	33%	33%	32,8%	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	100%	65%	65%	94%	65%	65%	5,5%	

6	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air Dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	100%	119%	119%	109%	119%	119%	22,3%
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat menyurat yang disediakan	100%	100%	11%	11%	11%	11%	11%	3,6%
8	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	100%	27%	27%	27%	27%	27%	4,3%
9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	100%	100%	83%	83%	98%	83%	83%	19,1%
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	100%	100%	76%	76%	94%	76%	76%	10,7%
11	Penyediaan Jasa Supir	Tersedianya jasa supir kantor	100%	100%	72%	72%	72%	72%	72%	14,4%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas layanan aparatur	100%	80%	17%	22%	7%	17%	17,3%	4%
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung/kantor yang diadakan	100%	100%	31%	31%	31%	31%	30,6%	5,1%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0,1%	0,0%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan perizinan	100%	100%	33%	33%	33%	33%	33,0%	6,0%

III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	75	80%	46%	58%	45%	46%	0,6%	18%
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90,1%	18,0%
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	100%	100%	91%	91%	91%	91%	91,4%	18,2%
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	100	80%	42%	52%	10%	42%	0,4%	9%
1	Peningkatan Mental dan spiritual SDM	Jumlah ASN yang mendapatkan bimbingan mental dan spiritual	100%	100%	12%	12%	12%	12%	11,5%	2,3%
2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal	100%	100%	5%	5%	5%	5%	5,4%	1,1%
3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	100%	120%	120%	120%	120%	120,4%	23,9%
V	Program Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran	Meningkatnya kualitas perencanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	100%	75%	31%	41%	44%	31%	31,0%	19%
1	Penyusunan Dokumen Dukung Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen yang disusun	100%	100%	29%	29%	29%	29%	28,9%	28,9%

2	Pelaporan dan Peningkatan Pendukung Tugas Teknis Lainnya Dinas PP dan PA ke Dalam Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pelaporan Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke dalam daerah	100%	100%	103%	103%	103%	103%	103,3%	14,7%
3	Koordinasi/Konsultasi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP dan PA ke Luar Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi/konsultasi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke luar daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%
4	Fasilitasi FK - PUSPA SUMUT	Jumlah rekomendasi Forum PUSPA	100%	100%	4%	4%	4%	4%	3,6%	3,6%
VI	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya kualitas perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	11.475	2.128	70%	32%	14%	24%	26,5%	35%
1	Fasilitasi UPT P2TP2A Sumatera Utara	Jumlah layanan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan di Unit Pelayanan Terpadu	5.660	960	970	101%	11%	0	21%	2,2%
2	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus Anak	Jumlah kebijakan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak yang disusun	5	1	-	0%	21%	0%	0,0%	5,5%

3	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus Anak Ke Dalam Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ke dalam daerah	75	15	13	87%	11%	0	21%	22,4%
4	Koordinasi/Konsultasi Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus Anak Ke Luar Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi/konsultasi Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ke luar daerah	70	14	14	100%	11%	0	21%	134,0%
5	Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan TPPO	Jumlah SDM anggota gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO yang mengikuti pelatihan dan difasilitasi	250	50	50	100%	11%	0	21%	15,9%
6	Pengelolaan Data Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah dokumen data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disusun	5	1	1	33%	15%	2	33%	14,9%
7	Penguatan Polah Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Kerjasama Dinas PP dan PA Provsu dengan Organisasi Lainnya	Jumlah kab/kota yang mendapatkan penguatan PAAR	2000	400	300	75%	11%	0	21%	45,4%
8	Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (Bina Keluarga TKI)	Jumlah peserta Bina Keluarga TKI (BK-TKI) yang dibina dan difasilitasi	1250	250	200	20%	30%	30	4%	5,3%
9	Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi pelatihan	1750	350	300	86%	90%	300	17%	90,1%

10	Penguatan dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Kondisi Tertentu	Jumlah perempuan dan anak dalam kondisi khusus yang mendapatkan penguatan dan fasilitasi	400	80	73	91%	92%	73	18%	34,0%
11	Penyusunan Standard Operasional Prosedur Layanan Pengaduan	Jumlah SOP yang disusun	10	7	7	14%	14%	7	70%	14,4%
VII	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga	Meningkatnya ualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga	6.814	1.451	53%	22%	13%	17%	18,4%	19%
1	Pembentukan Dan Penguatan Forum Komunikasi Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum	Forum Komunikasi perempuan bidang Sosial, Politik dan Hukum yang dibentuk dan atau mendapatkan penguatan	1	1	0	14%	0%	-	0%	0,0%
2	Penguatan SDM Pelaksana PPRG	SDM Pelaksana PPRG yang mendapatkan penguatan	500	100	66	14%	86%	66	13%	85,5%
3	Fasilitasi Pelaksanaan PUG Bidang Pembangunan Keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi pelaksanaan PUG bidang Pembangunan Keluarga	5000	1000	600	14%	9%	600	12%	1,8%
4	Penguatan Industri Rumahan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Jumlah pelaku Industri Rumahan yang mendapat Pelatihan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	875	175	75	14%	58%	75	9%	6,1%
5	Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	350	150	70	47%	14%	70	9%	2,1%

6	Pemantauan ,Evaluasi Dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga Ke Dalam Daerah	Rekomendasi hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga ke dalam daerah	33	10	14	90%	14%	9	27%	2,5%
7	Koordinasi/Konsultasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga Ke Luar Daerah	Rekomendasi hasil Koordinasi/konsultasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga ke luar daerah	5	5	4	61%	77%	3	61%	76,8%
8	Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah Rekomendasi Tingkat Provinsi yang dikeluarkan	45	9	9	0%	0%	-	0%	0,0%
9	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga	Jumlah Kebijakan yang disusun	5	1	0	0%	0%	-	0%	0,0%
VIII	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	7.246	1.499	64%	23%	15%	18%	19,7%	16%
1	Fasilitasi Pengembangan Forum Anak Daerah	Jumlah Forum Anak yang mendapatkan fasilitasi	33	33	33	100%	50%	33	100,0%	10,0%
2	Fasilitasi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	Jumlah Peserta yang mengikuti fasilitasi pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak	1500	300	300	100%	79%	300	20,0%	15,8%
3	Penguatan/Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak	Jumlah Kabupaten Kota Layak Anak	400	80	50	63%	83%	50	12,5%	16,5%

4	Penguatan Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak	Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan penguatan penyelenggaraan PRA (Puskesmas Ramah Anak)	750	150	100	50%	41%	100	9%	8,3%
5	Penguatan Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak	Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan penguatan penyelenggaraan SRA (Sekolah Ramah Anak)	500	100	70	0%	41%	70	9%	7,2%
6	Penguatan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya	Jumlah peserta yang mengikuti Penguatan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya	4.000	800	400	7%	22%	51	1%	3,9%
7	Pemantauan ,Evaluasi Dan Pelaporan Peningkatan Pemenuhan Hak Anak Ke Dalam Daerah	Rekomendasi hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Hak Anak Dalam Daerah	33	20	7	35%	64%	7	21%	7,1%
8	Koordinasi/Konsultasi Peningkatan Pemenuhan Hak Anak Ke Luar Daerah	Rekomendasi hasil Koordinasi/konsultasi Pelaksanaan Hak Anak ke Luar Daerah	25	15	6	40%	77%	6	24%	77,4%
9	Penyusunan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kebijakan Pemenuhan Hak Anak yang disusun	5	1	0	0%	0%	-	0%	0,0%
IX	Program Peningkatan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Data Gender Dan Anak	2.392	429	79%	0%	28%	79%	0%	5,7%

1	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	Jumlah data yang dikumpulkan, diolah, dianalisa dan disajikan	5	1	1	100%	29%	1	20%	5,7%
2	Pelatihan Pemanfaatan Sistem Informasi Gender dan Anak	jumlah SDM pengelola Sistem Informasi Gender dan Anak yang dilatih	400	80	40	50%	36%	40	10%	3,5%
3	Pelatihan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA)	jumlah SDM pengelola Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilatih	400	80	80	100%	89%	80	20%	17,7%
4	Pembuatan/Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi terkait Penyediaan dan Publikasi Data, Informasi Gender dan Anak	Aplikasi/sistem yang dibuat/ dikembangkan dalam mendukung pemanfaatan data terpilah	5	1	1	100%	22%	1	20%	4,0%
5	Penguatan Forum Data Terpilah Data Gender Dan Anak	jumlah Kab/kota yang mendapat penguatan forum data terpilah gender dan anak	400	40	40	100%	45%	40	10%	12,3%
6	Pemantauan ,Evaluasi Dan Pelaporan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Ke Dalam Daerah	Rekomendasi hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Hak Anak Dalam Daerah	100	13	12	92%	129%	12	12%	22,2%
7	Penyusunan Profil Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Profil pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disusun	13	3	1	33%	29%	1	8%	5,5%
8	KIE Pembangunan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Jumlah informasi yang disebarluaskan	5	3	3	100%	63%	3	60%	12,5%
9	Koordinas/Konsultasi Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Ke Luar Daerah	Rekomendasi hasil Koordinasi/konsultasi Pemanfaatan Data Gender dan Anak ke Luar Daerah	64	8	3	38%	95%	3	5%	94,9%

10	Fasilitasi Lembaga Penyedia Informasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Lembaga/Media Cetak, Elektronik dan Sosial yang difasilitasi	1000	200	200	100%	60%	200	20%	11,9%
----	--	---	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-------

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara maka dituangkanlah kinerja tersebut ke dalam beberapa Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG
2. Persentase layanan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan
3. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan
4. Rasio Kekerasan Terhadap Anak
5. Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju)

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 memperlihatkan adanya perlambatan kenaikan target kinerja walaupun tidak keseluruhan target yang disebabkan adanya penyesuaian kebijakan dan anggaran sebagai respon atas kondisi yang terjadi di Sumatera Utara terkhusus pada upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19 baik itu oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun dari Pemerintah melalui Kementerian terkait, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2019	Target 2020	Proyeksi 2021	Keterangan
1	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	Persen	34	60	70	Sumber perhitungan adalah dokumen perencanaan OPD Provinsi
2	Persentase layanan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	Persen	64	72	78	Sumber perhitungan adalah data layanan yang dilaksanakan oleh UPT P2TP2A
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	/100.000 korban	5	13	10	Data perhitungan bersumber dari laporan kekerasan pada aplikasi Simfoni yang disesuaikan dengan kondisi
4	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	/100.000 korban	11	18	15	
5	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju)	Persen	42	35	70	Penyesuaian target 2020 disesuaikan dengan perubahan kebijakan pencapaian indikator oleh Kementerian PPPA RI

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup baik, namun

berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang diharmonisasikan dengan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian PPPA RI, maka terdapat beberapa isu penting pembangunan PPPA yang akan diterapkan pada tahun 2021 yaitu :

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. Peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak;
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Penurunan pekerja anak;
5. Pencegahan perkawinan anak.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD adalah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD yang disusun berpedoman kepada RPJMD tahun rencana, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan sistematika penyusunan RKPD Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. Top-down, yaitu pendekatan dengan memperhatikan Program Prioritas dan kebijakan Pusat di daerah.
- b. Bottom-up, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang

disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Hasil dari Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota akan diakomodir dan disampaikan pada Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi Sumatera Utara.

- c. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi, berupa saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
- d. Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara.
- e. Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat yang bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi yang gunanya untuk menampung segala aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- f. Kompetitif, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan melalui usulan proposal. Proposal akan diseleksi melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pendekatan diatas, maka proses penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan disusun dengan tahapan:

- a. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
- b. Penyusunan Rancangan RKPD
- c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
- d. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
- e. Penetapan RKPD

Kedudukan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 merupakan RKPD tahun ke-3 selama periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023. Keterkaitan antara dokumen RKPD dengan RPJMD sesuai Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, menyatakan bahwa fungsi dan kedudukan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang tetap

mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA). RENSTRA menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RENJA tahunan yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan anggaran per kegiatan. Selain itu Rencana Kerja (RENJA) juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perumusan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan tentu saja akan memperhatikan dan menyesuaikan rencana kerja prioritas daerah dalam satu tahun anggaran (RKPD). Sebelum ditetapkan RAPBD, RKPD menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen ini sangat penting dibahas I-3 RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 lebih tajam sebelum sampai kepada rincian APBD. KUA memberikan suatu gambaran umum tentang kemampuan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran ke depan. Berdasarkan KUA, PPAS menetapkan prioritas plafon anggaran untuk setiap perangkat daerah berdasarkan fungsinya, plafon anggaran akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menentukan anggaran per program per kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunannya. Atas dasar itu, perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran. Akumulasi dari semua rencana kerja dan anggaran bagi seluruh Perangkat Daerah akan melahirkan RAPBD.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat: a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah

yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renca Perangkat Daerah; dan d. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui dokumen RKPD Sumatera Utara Tahun 2021 telah meletakkan beberapa kebijakan yang telah dituangkan ke dalam Indikator Kinerja Pembangunan PPPA Tahun 2021 yaitu :

Tabel. 5
Target Kinerja Tahun 2021

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN HINGGA TAHUN 2021			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2019	2020	2021	
1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	50	60	70	Dinas PP dan PA
2	Persentase layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	60	72	78	Dinas PP dan PA
3	Rasio kekerasan terhadap Perempuan (/ 100.000)	15	13	10	Dinas PP dan PA
4	Rasio kekerasan terhadap Anak (/ 100.000)	20	18	16	Dinas PP dan PA
5	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju)	15	35	75	Dinas PP dan PA

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:

- a. Lemahnya kelembagaan PUG (Pokja/Focal Point) serta rendahnya pemahaman perencana dalam menyusun PPRG membuat komitmen pengambil kebijakan dalam pembangunan yang Responsive Gender belum maksimal;
- b. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum tersedianya pusat informasi layanan terhadap anak
- c. Belum Optimalnya pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang (TPPO) terhadap perempuan dan belum

- optimalnya penanganan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan bencana
- d. Belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan data gender dan anak perencanaan pembangunan OPD.

Di dalam ranwal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 juga diharapkan dapat memuat isu gender yang telah menjadi isu Nasional dan Trans Nasional, dengan Arah kebijakan Pengarusutamaan Gender sebagai berikut:

1. Mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa melalui :
 - a. Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan;
 - b. Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan;
 - c. Penguatan pelaksanaan perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender (PPRG) di semua jenjang pemerintahan;
 - d. Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsive gender;
 - e. Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah.
2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan melalui :
 - a. Peningkatan kapasitas perempuan untuk mengurangi kesenjangan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi, serta menerima manfaat pembangunan;
 - b. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendorong peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Dinas PPPA Sumatera Utara didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah yang mana pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel. 6
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Usulan Masyarakat Tahun 2021

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-6	-7	-2	-3	-4	-6	-7	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					13.316.999.721	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					14.648.699.693
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Dinas PP dan PA	80	2.122.121.123		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Dinas PP dan PA	80	2.334.333.235	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terselesaikan dengan baik	Dinas PP dan PA	12 bulan	621.982.993	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terselesaikan dengan baik	Dinas PP dan PA	12 bulan	684.181.292	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	Dinas PP dan PA	100%	92.088.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	Dinas PP dan PA	100%	101.297.020	
3	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	Dinas PP dan PA	100%	122.019.460	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	Dinas PP dan PA	100%	134.221.406	

	4	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas PP dan PA	100%	99.447.800	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas PP dan PA	100%	109.392.580
	5	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas PP dan PA	100%	17.537.300	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas PP dan PA	100%	19.291.030
	6	Penyediaan Jasa administrasi keuangan/pendukung perkantoran	Jasa administrasi keuangan yang disediakan	Dinas PP dan PA	12 bulan	768.385.350,00	Penyediaan Jasa administrasi keuangan/pendukung perkantoran	Jasa administrasi keuangan yang disediakan	Dinas PP dan PA	12 bulan	845.223.885
	7	Penyediaan Jasa kebersihan	Jasa kebersihan yang disediakan	Dinas PP dan PA	12 bulan	192.516.115	Penyediaan Jasa kebersihan	Jasa kebersihan yang disediakan	Dinas PP dan PA	12 bulan	211.767.727
	8	Fasilitasi Jasa Pengamanan	Jasa pengamanan yang disediakan	Dinas PP dan PA	12 bulan	105.733.070	Fasilitasi Jasa Pengamanan	Jasa pengamanan yang disediakan	Dinas PP dan PA	12 bulan	116.306.377
	9	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman yang disediakan	Dinas PP dan PA	100%	49.600.500	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman yang disediakan	Dinas PP dan PA	100%	54.560.550
	10	Penyediaan Jasa Supir	Jasa supir yang disediakan	Dinas PP dan PA	12 bulan	52.810.335	Penyediaan Jasa Supir	Jasa supir yang disediakan	Dinas PP dan PA	12 bulan	58.091.369
II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas layanan aparatur	Dinas PP dan PA	82%	1.248.417.170		Meningkatnya kualitas layanan aparatur	Dinas PP dan PA	82%	1.373.258.887

	11	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Dinas PP dan PA	12 bulan	218.431.650	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Dinas PP dan PA	12 bulan	240.274.815
	12	Pengadaan perlengkapan gedung/kantor	Perlengkapan gedung/kantor yang diadakan	Dinas PP dan PA	8 unit	795.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung/kantor	Perlengkapan gedung/kantor yang diadakan	Dinas PP dan PA	8 unit	874.500.000
	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	Dinas PP dan PA	1 unit	135.770.920	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	Dinas PP dan PA	1 unit	149.348.012
	14	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja	Peralatan dan perlengkapan kerja yang diadakan	Dinas PP dan PA	5 unit	99.214.600	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja	Peralatan dan perlengkapan kerja yang diadakan	Dinas PP dan PA	5 unit	109.136.060
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya disiplin aparatur	Dinas PP dan PA	80%	80.000.000		Meningkatnya disiplin aparatur	Dinas PP dan PA	80%	88.000.000
	15	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Dinas PP dan PA	50 stel	45.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Dinas PP dan PA	50 stel	49.500.000
	16	Pengadaan khusus hari hari tertentu	Pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	Dinas PP dan PA	50 stel	35.000.000	Pengadaan khusus hari hari tertentu	Pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	Dinas PP dan PA	50 stel	38.500.000

IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kapasitas aparatur		77%	47.988.000		Meningkatnya kapasitas aparatur		77%	52.786.800
	17	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Dinas PP dan PA	10 orang	3.900.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Dinas PP dan PA	10 orang	4.290.000
	18	Peningkatan Mental dan Spiritual SDM	Jumlah SDM yang mendapatkan bimbingan mental dan spiritual	Dinas PP dan PA	50 orang	39.600.000	Peningkatan Mental dan Spiritual SDM	Jumlah SDM yang mendapatkan bimbingan mental dan spiritual	Dinas PP dan PA	50 orang	43.560.000
	19	Penyediaan Barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinas PP dan PA	5 eks	4.488.000	Penyediaan Barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinas PP dan PA	5 eks	4.936.800
V	Program Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran		Meningkatnya kualitas perencanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas PP dan PA	72%	1.610.892.600		Meningkatnya kualitas perencanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas PP dan PA	72%	1.771.981.860
	20	Penguatan Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen yang disusun	Medan	5 dok	95.730.000	Penguatan Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen yang disusun	Medan	5 dok	105.303.000

	21	Pelaporan dan Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke dalam daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pelaporan Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke dalam daerah	Dinas PP dan PA	40 lap	641.755.000	Pelaporan dan Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke dalam daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pelaporan Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke dalam daerah	Dinas PP dan PA	40 lap	705.930.500
	22	Koordinasi/konsultasi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke luar daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi/konsultasi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke luar daerah	Dinas PP dan PA	40 lap	748.207.600	Koordinasi/konsultasi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke luar daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi/konsultasi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke luar daerah	Dinas PP dan PA	40 lap	823.028.360
	23	Fasilitas FK - PUSPA SUMUT	Jumlah rekomendasi	Dinas PP dan PA	1 keg	125.200.000	Fasilitas FK - PUSPA SUMUT	Jumlah rekomendasi	Dinas PP dan PA	1 keg	137.720.000
VI		Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya kualitas perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	Dinas PP dan PA		3.466.321.290		Meningkatnya kualitas perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	Dinas PP dan PA		3.812.953.419
	24	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Jumlah kebijakan yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	1 dok	76.900.000	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Jumlah kebijakan yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	1 dok	84.590.000

25	Penguatan / advokasi pencegahan KDRT	Jumlah Pemangku Kepentingan dan masyarakat yang Mendapatkan Advokasi KDRT	Provinsi Sumatera Utara	200 org	93.911.300	Penguatan / advokasi pencegahan KDRT	Jumlah Pemangku Kepentingan dan masyarakat yang Mendapatkan Advokasi KDRT	Provinsi Sumatera Utara	200 org	103.302.430
26	Pelatihan SDM lembaga layanan Perlindungan Anak	Jumlah SDM mengikuti Pelatihan SDM lembaga layanan Perlindungan Anak	Provinsi Sumatera Utara	300 org	182.080.000	Pelatihan SDM lembaga layanan Perlindungan Anak	Jumlah SDM mengikuti Pelatihan SDM lembaga layanan Perlindungan Anak	Provinsi Sumatera Utara	300 org	200.288.000
27	Advokasi Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah lembaga yang mendapatkan Advokasi Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Provinsi Sumatera Utara	50 lbg	128.679.100	Advokasi Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah lembaga yang mendapatkan Advokasi Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Provinsi Sumatera Utara	50 lbg	141.547.010
28	Pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan Pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak	Provinsi Sumatera Utara	300 org	132.625.000	Pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan Pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak	Provinsi Sumatera Utara	300 org	145.887.500
29	Fasilitasi UPT P2TP2A Sumatera Utara	Jumlah korban yang dilayani	Provinsi Sumatera Utara	250 org	1.751.989.840	Fasilitasi UPT P2TP2A Sumatera Utara	Jumlah korban yang dilayani	Provinsi Sumatera Utara	250 org	1.927.188.824

30	Penguatan dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Jumlah perempuan dan Anak yang mendapat penguatan dan fasilitasi perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak	Provinsi Sumatera Utara	33 kab/kota	392.106.500	Penguatan dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Jumlah perempuan dan Anak yang mendapat penguatan dan fasilitasi perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak	Provinsi Sumatera Utara	33 kab/kota	431.317.150
31	Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO	Jumlah SDM yang mendapatkan Penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO	Provinsi Sumatera Utara	200 org	115.419.050	Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO	Jumlah SDM yang mendapatkan Penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO	Provinsi Sumatera Utara	200 org	126.960.955
32	Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (BK-TKI)	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI	Provinsi Sumatera Utara	250 org	188.325.000	Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (BK-TKI)	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI	Provinsi Sumatera Utara	250 org	207.157.500
33	Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Aktivis PATBM di kabupaten/kota yang mendapat pelatihan	Provinsi Sumatera Utara	800 org	331.597.500	Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Aktivis PATBM di kabupaten/kota yang mendapat pelatihan	Provinsi Sumatera Utara	800 org	364.757.250
34	Advokasi Perlindungan Khusus Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi perlindungan khusus anak	Provinsi Sumatera Utara	10 lbg	72.688.000	Advokasi Perlindungan Khusus Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi perlindungan khusus anak	Provinsi Sumatera Utara	10 lbg	79.956.800

VII	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga		65	1.354.791.260		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga		65	1.490.270.386
	35	Penyusunan Kebijakan mendukung Implementasi Strategi PUG	Jumlah Kebijakan yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	1 dok	139.466.460	Penyusunan Kebijakan mendukung Implementasi Strategi PUG	Jumlah Kebijakan yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	1 dok	153.413.106
	36	Pembentukan dan penguatan forum komunikasi perempuan bidang sosial, politik dan hukum	Jumlah Lembaga Politik yang mendapatkan Penguatan.	Provinsi Sumatera Utara	15 lbg	39.322.000	Pembentukan dan penguatan forum komunikasi perempuan bidang sosial, politik dan hukum	Jumlah Lembaga Politik yang mendapatkan Penguatan.	Provinsi Sumatera Utara	15 lbg	43.254.200
	37	Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan bidang ekonomi	Provinsi Sumatera Utara	7 lbg	173.359.300	Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan bidang ekonomi	Provinsi Sumatera Utara	7 lbg	190.695.230
	38	Penguatan Industri Rumahan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Jumlah pelaku IR yang mendapatkan penguatan	Provinsi Sumatera Utara	100 org	54.064.400	Penguatan Industri Rumahan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Jumlah pelaku IR yang mendapatkan penguatan	Provinsi Sumatera Utara	100 org	59.470.840
	39	Fasilitasi pelaksanaan PUG bidang Pembangunan Keluarga	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Fasilitas pelaksanaan PUG bidang pembangunan keluarga	Provinsi Sumatera Utara	5 lbg	174.999.850	Fasilitasi pelaksanaan PUG bidang Pembangunan Keluarga	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Fasilitas pelaksanaan PUG bidang pembangunan keluarga	Provinsi Sumatera Utara	5 lbg	192.499.835

40	Penguatan SDM pelaksana PPRG	Jumlah SDM yang memperoleh penguatan Pelaksanaan PPRG.	Provinsi Sumatera Utara	100 org	88.265.000	Penguatan SDM pelaksana PPRG	Jumlah SDM yang memperoleh penguatan Pelaksanaan PPRG.	Provinsi Sumatera Utara	100 org	97.091.500
41	Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi	Provinsi Sumatera Utara	33 kab/kota	125.521.500	Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi	Provinsi Sumatera Utara	33 kab/kota	138.073.650
42	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial	Jumlah SDM yang mendapatkan Penguatan.	Provinsi Sumatera Utara	100 org	48.914.000	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial	Jumlah SDM yang mendapatkan Penguatan.	Provinsi Sumatera Utara	100 org	53.805.400
43	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	Provinsi Sumatera Utara	100 org	100.130.000	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	Provinsi Sumatera Utara	100 org	110.143.000
44	Advokasi/Penguatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Jumlah peserta yang mendapatkan advokasi/Penguatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Provinsi Sumatera Utara	350 org	369.999.750	Advokasi/Penguatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Jumlah peserta yang mendapatkan advokasi/Penguatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Provinsi Sumatera Utara	350 org	406.999.725
45	Penguatan dan pengembangan kelembagaan PUG bidang ekonomi	Jumlah SDM yang memperoleh penguatan Pelaksanaan PPRG.	Provinsi Sumatera Utara	30 org	40.749.000	Penguatan dan pengembangan kelembagaan PUG bidang ekonomi	Jumlah SDM yang memperoleh penguatan Pelaksanaan PPRG.	Provinsi Sumatera Utara	30 org	44.823.900

VIII	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak		Meningkatnya Kabupaten/Kota Layak Anak			2.244.895.828		Meningkatnya Kabupaten/Kota Layak Anak			2.469.385.411
46	Penyusunan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kebijakan Pemenuhan Hak Anak yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	1 dok	179.250.000	Penyusunan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kebijakan Pemenuhan Hak Anak yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	1 dok	197.175.000	
47	Advokasi dan Pembentukan Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak (APSAI)	Jumlah perusahaan yang mendapatkan Advokasi APSAI	Provinsi Sumatera Utara	20 prshn	56.925.000	Advokasi dan Pembentukan Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak (APSAI)	Jumlah perusahaan yang mendapatkan Advokasi APSAI	Provinsi Sumatera Utara	20 prshn	62.617.500	
48	Penguatan/Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Masyarakat yang mendapatkan layanan	Provinsi Sumatera Utara	1000 org	197.508.000	Penguatan/Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Masyarakat yang mendapatkan layanan	Provinsi Sumatera Utara	1000 org	217.258.800	
49	Penguatan Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak	Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan PRA	Provinsi Sumatera Utara	250 org	272.190.000	Penguatan Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak	Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan PRA	Provinsi Sumatera Utara	250 org	299.409.000	
50	Penguatan Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak	Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan SRA	Provinsi Sumatera Utara	210 org	126.527.000	Penguatan Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak	Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan SRA	Provinsi Sumatera Utara	210 org	139.179.700	

	51	Fasilitasi pemenuhan hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Jumlah FAD yang mendapatkan Fasilitas pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak	Provinsi Sumatera Utara	3 fad	183.650.000	Fasilitasi pemenuhan hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Jumlah FAD yang mendapatkan Fasilitas pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak	Provinsi Sumatera Utara	3 fad	202.015.000
	52	Penguatan/pemben- tukan Kab/Kota Layak Anak	Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan	Provinsi Sumatera Utara	264 org	225.355.000	Penguatan/pembe- ntukan Kab/Kota Layak Anak	Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan	Provinsi Sumatera Utara	264 org	247.890.500
	53	Penguatan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya	Jumlah anak mendapatkan Penguatan pemenuhan hak anak atas pendidikan, kreativitas dan budaya	Provinsi Sumatera Utara	1600 org	480.478.328	Penguatan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya	Jumlah anak mendapatkan Penguatan pemenuhan hak anak atas pendidikan, kreativitas dan budaya	Provinsi Sumatera Utara	1600 org	528.526.161
	54	Fasilitasi Pengembangan Forum Anak Daerah	Jumlah FAD yang difasilitasi	Provinsi Sumatera Utara	33 fad	454.162.000	Fasilitasi Pengembangan Forum Anak Daerah	Jumlah FAD yang difasilitasi	Provinsi Sumatera Utara	33 fad	499.578.200
	55	Penguatan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)	Jumlah peserta yang mendapatkan Penguatan	Provinsi Sumatera Utara	150 org	68.850.500	Penguatan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)	Jumlah peserta yang mendapatkan Penguatan	Provinsi Sumatera Utara	150 org	75.735.550
IX	Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak		Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan uptodate			1.141.572.450		Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan uptodate			1.255.729.695

56	Pelatihan Pemanfaatan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan pemanfaatan sistem informasi gender dan anak (SIGA)	Provinsi Sumatera Utara	80 org	49.948.000	Pelatihan Pemanfaatan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan pemanfaatan sistem informasi gender dan anak (SIGA)	Provinsi Sumatera Utara	80 org	54.942.800
57	Pelatihan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI - PPA)	Jumlah SDM Pelatihan Pemanfaatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)	Provinsi Sumatera Utara	66 org	152.956.750	Pelatihan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI - PPA)	Jumlah SDM Pelatihan Pemanfaatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)	Provinsi Sumatera Utara	66 org	168.252.425
58	Penyusunan profil pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah dokumen profil yang dihasilkan	Provinsi Sumatera Utara	3 dok	211.758.000	Penyusunan profil pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah dokumen profil yang dihasilkan	Provinsi Sumatera Utara	3 dok	232.933.800
59	KIE pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah KIE yang dikeluarkan melalui media cetak, elektronik dan online	Provinsi Sumatera Utara	3 media	364.351.700	KIE pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah KIE yang dikeluarkan melalui media cetak, elektronik dan online	Provinsi Sumatera Utara	3 media	400.786.870
60	Advokasi Pemanfaatan Media Informasi	Jumlah Peserta yang mengikuti advokasi	Provinsi Sumatera Utara	15 lbg	219.408.000	Advokasi Pemanfaatan Media Informasi	Jumlah Peserta yang mengikuti advokasi	Provinsi Sumatera Utara	15 lbg	241.348.800

61	Pembuatan/Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi terkait penyediaan dan publikasi Data, Informasi Gender dan Anak	Jumlah aplikasi/modul yang di kembangkan	Provinsi Sumatera Utara	1 aplikasi	18.000.000	Pembuatan/Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi terkait penyediaan dan publikasi Data, Informasi Gender dan Anak	Jumlah aplikasi/modul yang di kembangkan	Provinsi Sumatera Utara	1 aplikasi	19.800.000
62	Penguatan Forum Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah SDM yang mendapatkan Penguatan Forum Data Terpilah, Data Gender dan Anak	Provinsi Sumatera Utara	200 org	125.150.000	Penguatan Forum Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah SDM yang mendapatkan Penguatan Forum Data Terpilah, Data Gender dan Anak	Provinsi Sumatera Utara	200 org	137.665.000

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024, dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memiliki perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mencakup: (a) penguatan kebijakan dan regulasi, (b) percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), (c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.
2. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO, mencakup: a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi; b) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang KtP dan TPPO; c) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan tentang KtP dan TPPO; d) penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM

penyedia layanan, koordinasi antarunit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; e) pengembangan sistem data terpadu KtP dan TPPO; f) pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KtP dan TPPO; g) penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga bantuan hukum; dan h) pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan KtP dan TPPO.

3. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya, mencakup: a) penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak; g) penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya; i) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, dan j) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 untuk pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini sesuai dengan RPJMD Sumatera Utara tahun 2019 - 2023 yang mempunyai visi **“Sumatera Utara Maju, Aman, Sejahtera dan Bermartabat”** pada Misi ke 4 yaitu **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan** pada **Bidang Sosial Budaya dan Perempuan**, dengan agenda :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan melalui pendidikan, pelatihan, dan kesempatan dalam berbagai bidang pembangunan, sehingga perempuan Sumatera Utara dapat memberikan partisipasi maksimal dalam pembangunan;
- b. Meningkatkan kesadaran kaum perempuan terhadap peran tak tergantikan mereka dalam penguatan rumah tangga, pendidikan pertama dan utama generasi, keharmonisan keluarga, moralitas anak dan kedamaian para suami, sehingga stabilitas dan harmonitas masyarakat Sumatera Utara dapat terwujud;
- c. Meningkatkan kesadaran kaum perempuan akan peran strategis mereka dalam menghindarkan anak-anak dan suami mereka dari kecanduan narkoba, judi, prostitusi, radikalisme, dan terorisme, serta penyakit sosial lainnya.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Secara Umum Tujuan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 yaitu :

- Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta optimalisasi kualitas layanan;
- Meningkatkan pemenuhan hak anak.

Adapun sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah :

- Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
- Meningkatnya perlindungan terhadap hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- Meningkatnya kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- Meningkatnya pemenuhan hak anak;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam kaitan dengan keselarasan antara program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Dinas PPPA Sumatera Utara Tahun 2021 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Tentang. Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka telah disusun program dan kegiatan DPPPA Sumatera Utara untuk Tahun 2021 sebagai berikut :

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

15. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

8. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
 17. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
 18. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
9. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
 19. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
10. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
 20. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

III PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

11. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 21. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
 22. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
12. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 23. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 24. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
13. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
 25. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 26. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi

IV PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

14. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
27. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
28. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

V PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

15. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
29. Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
30. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

VI PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

16. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
31. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
17. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
32. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
33. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
34. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota

VII PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

18. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
35. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
19. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
36. Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
37. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
20. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota
38. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 dengan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 7
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-10	-11
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					16.806.666.700			18.481.966.415	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Dinas PP dan PA	100%	12.647.987.660		100%	13.912.786.426	APBD
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			61.292.000			67.421.200	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PP dan PA	10 dok	61.292.000		10 dok	67.421.200	
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.042.531.733			11.046.784.907	

	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan tersedia	Dinas PP dan PA	14 bulan	9.535.761.733		14 bulan	10.489.337.907	
	3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa yang disediakan	Dinas PP dan PA	12 bulan	506.770.000		12 bulan	557.447.000	
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.235.000			4.658.500	
	4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti	Dinas PP dan PA	2 kali	4.235.000		2 kali	4.658.500	
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.238.209.044			1.362.029.948	
	5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah komponen instalasi / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas PP dan PA	12 bulan	19.291.030		12 bulan	21.220.133	
	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas PP dan PA	7 unit	26.950.000		7 unit	29.645.000	
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas PP dan PA	12 bulan	155.094.099		12 bulan	170.603.508	
	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas PP dan PA	12 bulan	74.799.615		12 bulan	82.279.577	

	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Dinas PP dan PA	1320 eks	4.936.800		1320 eks	5.430.480	
	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Sumut dan Indonesia	12 bulan	957.137.500		12 bulan	1.052.851.250	
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				129.305.000			142.235.500	
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan gedung/kantor yang disediakan	Dinas PP dan PA	31 unit	129.305.000		31 unit	142.235.500	
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				882.847.528			971.132.281	
	12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas PP dan PA	12 bulan	608.287.528		12 bulan	669.116.281	
	13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinas PP dan PA	12 bulan	274.560.000		12 bulan	302.016.000	

	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				289.567.355			318.524.091	
	14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas yang disediakan	Dinas PP dan PA	12 bulan	199.213.135		12 bulan	219.134.449	
	15	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan sarpras gedung yang mendapatkan pemeliharaan	Dinas PP dan PA	12 bulan	24.436.720		12 bulan	26.880.392	
	16	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan sarpras pendukung gedung yang mendapatkan pemeliharaan	Dinas PP dan PA	12 bulan	65.917.500		12 bulan	72.509.250	
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD Provinsi			28%	319.386.000		53%	362.720.490	APBD

		Persentase Industri Rumahan Mandiri		43%			53%		
		Persentase layanan kualitas keluarga yang tersedia		80%			85%		
8	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					103.599.000			125.354.790
17	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah focal point PD yang mendapatkan pelatihan penyusunan PPRG	Sumut	135 orang		60.634.000		135 orang	73.367.140
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan peran perempuandalam politik	Sumut	1 dok		42.965.000		1 dok	51.987.650
9	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi					103.191.000			113.510.100

	19	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaku IR yang mendapatkan pelatihan Market Place	Sumut	300 IR	103.191.000		300 IR	113.510.100	
	10	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				112.596.000			123.855.600	
	20	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaku IR yang mengikuti penguatan keuangan		250 IR	112.596.000		250 IR	123.855.600	
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Perlindungan Perempuan Terimplementasi		60%	1.712.341.620		70%	1.866.812.937	APBD

	11	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				167.628.450			167.628.450	
	21	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi Perempuan dan Anak dari TindakKekerasan		300 orang	108.316.450		350 orang	119.148.095	
	22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi		150 orang	59.312.000		200 orang	65.243.200	
	12	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.144.476.080			1.258.923.688	

	23	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan yang diberikan	Sumut	1.150 layanan	674.798.080		1.150 layanan	742.277.888	
	24	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				469.678.000			516.645.800	
	13	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				400.237.090			440.260.799	
	25	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan penguatan	Sumut	350 orang	249.361.640		400 orang	274.297.804	

	26	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah pemenuhan kebutuhan spesifik dalam kondisi khusus dan kondisi darurat	Sumut	500 orang	150.875.450		550 orang	165.962.995	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase layanan kualitas keluarga yang tersedia		80%	150.884.800		85%	165.973.280	APBD
	14	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				150.884.800			165.973.280	
	27	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan KIE KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga	Sumut	150 orang	56.981.100		200 orang	62.679.210	

	28	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan penguatan mengenai layanan kualitas keluarga	Sumut	250 lembaga	93.903.700		300 lembaga	103.294.070	
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase data gender dan anak berbasis urusan yang tersedia		47%	600.897.550		50%	660.987.305	APBD
	15	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				600.897.550			660.987.305	
	29	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Persentase variabel data gender dan anak yang disediakan	Sumut	70 %	99.394.625		70 %	109.334.088	
	30	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah variabel data gender dan anak yang dimanfaatkan	Sumut	100 variabel	501.502.925		100 variabel	551.653.218	
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase kluster hak anak terimplementasi		75%	846.717.300		80%	931.389.030	APBD

	16	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				30.250.000			33.275.000	
	31	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Pemenuhan Hak Anak yang disusun	Sumut	1 dok	30.250.000		1 dok	33.275.000	
	17	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				816.467.300			898.114.030	
	32	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapatkan advokasi layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Sumut	1500 orang	290.796.000		2000 orang	319.875.600	

	33	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Forum Anak yang mendapatkan edukasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Sumut	33 FAD	386.647.800		33 FAD	425.312.580	
	34	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah kab/kota yang mendapatkan penguatan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Sumut	33 kab/kota	139.023.500		33 kab/kota	152.925.850	
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase perlindungan khusus anak Terimplementasi		60%	528.451.770		70%	581.296.947	APBD
	18	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				149.511.120			164.462.232	

	35	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Sumut	226 orang	149.511.120		250 orang	164.462.232	
	19	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				293.765.450			323.141.995	
	36	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapatkan pengembangan KIE anak yang memerlukan perlindungan khusus		250 orang	62.342.500		300 orang	68.576.750	
	37	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Aktifis PATBM di kabupaten/kota yang mendapat pelatihan		355 orang	231.422.950		400 orang	254.565.245	

	20	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota				85.175.200			93.692.720	
	38	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta penyedia layanan yang mendapatkan advokasi peningkatan kapasitas		100 orang	85.175.200		150 orang	93.692.720	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 ini mempedomani Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 tahun 2019-2023 dan diharapkan menjadi perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi serta kondisi, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan layanan dan kondisi lain yang tidak dapat diantisipasi seperti bencana..

Proses penyusunan rencana kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen masyarakat, Akademisi, tenaga ahli, Lembaga Masyarakat yang fokus dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara serta seluruh pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di 33 kabupaten/kota se Sumatera Utara yang selanjutnya dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan dalam penentuan anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal.

Rencana Kerja Tahun 2021 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai perencanaan dan

target sasaran yang telah ditetapkan serta berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas. Permasalahan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan perlu diantisipasi dengan baik agar tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara secara intensif.

Medan, November 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROPINSI SUMATERA UTARA

dto

Hj. NURLELA, SH,M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19621023 198602 2 001